

**JUSTISIABILITAS HAK EKOSOB MELALUI MEKANISME INDIVIDUAL COMMUNICATION DALAM
OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS**

***ECOSOC RIGHTS JUSTICIABILITY THROUGH INDIVIDUAL COMMUNICATION MECHANISM
UNDER THE OPTIONAL PROTOCOL TO THE ICESCR***

Harison Citrawan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Pusat Litbang Transformasi Konflik Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email : h.citrawan@hotmail.com

(Naskah diterima : 15/4/2014, direvisi : 12/12/2014, disetujui : 12/12/2014)

Abstrak

Mekanisme komunikasi individual (*individual communication*) dalam Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat dianggap sebagai perwujudan komitmen negara-negara dalam upaya penegakan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Tulisan ini mencoba menggambarkan tantangan normatif mekanisme komunikasi individual yang diemban oleh Komite Hak Ekosob, meliputi: *admissibility* dalam tiga hal *ratione personae*, *ratione temporis*, dan *ratione materiae*. Selain itu, analisis akan dilakukan terhadap persoalan apakah mekanisme komunikasi individual tersebut dapat memberikan cara yang efektif untuk mempromosikan kepatuhan (*compliance*) negara terhadap kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak ekosob. Adapun tulisan ini menyimpulkan beberapa hal: *pertama*, Protokol Opsional ICESCR ini merupakan hasil kompromis antara sifat hak-hak dengan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban dalam ICESCR; *kedua*, Komite Hak Ekosob akan mendukung kebutuhan terhadap lembaga adjudikasi dalam rangka memperjelas cara pandang tradisional terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan *ketiga*, diperlukan sebuah koordinasi yang komprehensif dan kerjasama dengan institusi hak asasi manusia yang lainnya, baik yang bersifat *treaty based* ataupun badan-badan khusus PBB, tidak hanya dalam masalah teknis tetapi juga dalam cara menafsirkan hukum.

Kata Kunci: komunikasi individual, justisiabilitas, hak ekonomi, sosial dan budaya.

Abstract

The individual communication mechanism enshrined under the Optional Protocol of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights could be regarded as a form of state's commitment to make economic, social and cultural (ecosoc) rights justiciable. This paper attempts to depict several aspects of the working mechanism of individual communication exercised by the Ecosoc Rights Committee, including: admissibility of ratione personae, ratione temporis, and ratione materiae. Furthermore, analysis will be taken on the issue of whether such a mechanism could give an effective way to promote state's compliance on ecosoc rights fulfillment. In brief, this paper concludes several points: first, the Optional Protocol is to be regarded as a compromise between the nature of the rights and the duties ruled under the Covenant; second, the Ecosoc Rights Committee shall accommodate the need of adjudicative body in order to shift the traditional view of ecosoc rights; and third, there is a need of a comprehensive coordination and cooperation amongst both treaty based and charter based human rights institutions, not only on technical issues but also on the legal interpretation method.

Keywords: individual communication, justiciability, economic, social and cultural rights

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembentukan Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menyampaikan dua penegasan yang patut dicermati. Pertama adalah penegasan terhadap pengakuan yang kian mengemuka dari rezim mekanisme pemantauan (*monitoring*) internasional hak asasi manusia, dan yang kedua adalah penegasan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak yang dapat ditegakkan (*justiciable*). Dalam Protokol ini, kedua penegasan tersebut saling menguatkan satu sama lain dan diikat bersama dalam sebuah mekanisme komunikasi individual (*individual communication*) yang mengemban tujuan utama untuk mencapai sasaran-sasaran yang tersurat di dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Oleh sebab itu, mekanisme ini memiliki implikasi yang lebih luas, yakni “*would reset the balance between economic, social and cultural rights and civil and political rights, which already has a similar individual complaint mechanism in place.*”¹ Mengingat fakta bahwa Protokol ini masih relatif baru,² tulisan ini mencoba untuk menganalisis aplikabilitas mekanisme komunikasi individual dalam Protokol, melalui pertama-tama dengan mengamati bagaimana cara kerja Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Komite Hak Ekosob), serta kemudian menyampaikan analisis

komparatif mekanisme Protokol dengan mekanisme pemantauan perjanjian HAM internasional lainnya, terutama Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*) untuk Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Adapun keseluruhan analisis akan difokuskan untuk menggambarkan tantangan normatif Komite dalam rangka menegakkan justisiabilitas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Prosedur Komunikasi Individual

Pada prinsipnya, negara-negara pihak Protokol Opsional ICESCR menyadari bahwa terdapat kebutuhan lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan dari ICESCR serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Untuk mewujudkan hal ini, negara-negara tersebut menganggap sesuai untuk membentuk Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam kerangka perwujudan tujuan ICESCR.³ Dengan menjadi pihak pada Protokol ini, negara pihak pada Kovenan juga harus mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi individual sebagaimana diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam Protokol.

Terkait dengan komunikasi individual ini, terdapat dua artikel utama yang penting untuk dianalisis. Pertama adalah Pasal 2 Protokol Opsional yang mengatur bahwa:

Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the economic, social and cultural rights set forth in the Covenant by that State Party.

Dan aturan kedua, dalam hal dapat diterima

3. Preamble, Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, GA Res. 832, UN GAOR, 63rd Session, UN Doc A/RES/63/117 (2008).

1. Third Committee Recommends General Assembly Adoption of Optional Protocol to International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, Sixty-third General Assembly, Third Committee, 40 and 41st Meetings, GA/SHC/3938, 18 November 2008.

2. Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights mulai berlaku sejak tanggal 5 Mei 2013. Status pada 14-04-2014 05:03:10 EDT, terdapat 45 negara penandatanganan dan 13 negara pihak.

(admissibility), Pasal 3 Protokol Opsional menyebutkan bahwa:

(1) *The Committee shall not consider a communication unless it has ascertained that all available domestic remedies have been exhausted. This shall not be the rule where the application of such remedies is unreasonably prolonged.*

(2) *The Committee shall declare a communication inadmissible when:*

a. *It is not submitted within one year after the exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can demonstrate that it had not been possible to submit the communication within that time limit;*

b. *The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the present Protocol for the State Party concerned unless those facts continued after that date;*

c. *The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined under another procedure of international investigation or settlement;*

d. *It is incompatible with the provisions of the Covenant;*

e. *It is manifestly ill-founded, not sufficiently substantiated or exclusively based on reports disseminated by mass media;*

f. *It is an abuse of the right to submit a communication; or when*

g. *It is anonymous or not in writing.*

Berbagai institusi internasional pemantau hak asasi manusia (baik yang dibentuk melalui Piagam PBB atau disebut *charter based*, maupun melalui perjanjian HAM internasional atau disebut *treaty based*) telah mengadopsi beberapa aturan umum (*common rules*) dalam memutuskan sebuah komunikasi individual. Secara umum, terdapat empat unsur yang diakui oleh institusi-institusi tersebut yang harus dipenuhi dalam melakukan validasi terhadap sebuah komunikasi.

Pertama ialah unsur dapat diterima (*admissibility*) *ratione personae*. Dalam Protokol ini, komunikasi dibatasi hanya untuk tuntutan (*complaint*) dari orang-orang dan kelompok-kelompok individu yang berada di bawah yurisdiksi negara pihak. Jika kita bandingkan dengan Protokol Opsional untuk ICCPR misalnya, tidak terdapat aturan tentang ‘pembatasan yurisdiksi’ di dalamnya, yang dapat diasumsikan bahwa Protokol untuk ICESCR masih membawa perdebatan lama tentang sifat justisiabilitas hak-hak ekosob di dalamnya.

Terkait pembatasan tersebut, Pasal 2 draft pertama Protokol memberikan kemungkinan bagi lembaga swadaya masyarakat internasional yang memiliki status konsultatif ECOSOC untuk menyampaikan komunikasi, serta memungkinkan negara pihak untuk menyatakan bahwa organisasi nasional tertentu memiliki hak untuk mengajukan komunikasi kolektif.⁴ Namun demikian, pengajuan konsep tersebut dihapus atas dasar-dasar berikut: (i) bahwa konsep demikian tidak memiliki dukungan yang jelas, (ii) pentingnya memastikan konsistensi antar instrumen hak asasi manusia PBB yang tidak mengadopsi konsep komunikasi kolektif, dan (iii) fakta yang ditunjukkan oleh banyak delegasi bahwa

4. Revised Draft Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, A/HRC/8/WG.4/2, 24 December 2007.

kemungkinan untuk kelompok atau individu untuk mengirimkan komunikasi sudah tercakup dalam Pasal 2.⁵

Kedua ialah unsur dapat diterima *ratione temporis*. Layaknya organ-organ yang berbasis perjanjian (*treaty-based organs*) lainnya, dalam rangka melaksanakan tugas penegakan kewajiban hak asasi manusia Komite Hak Ekosob juga dibekali dengan prinsip non-retroaktif dan doktrin pelanggaran berlanjut (*continuing violations*).⁶ Di sisi lain, Protokol juga mengatur tentang batas waktu dapat diterimanya komunikasi kepada Komite, yakni satu tahun setelah terpenuhinya seluruh mekanisme penanganan pelanggaran HAM secara domestik (*exhaustion of domestic remedy*), serta fakta-fakta yang menjadi substansi komunikasi harus terjadi sebelum tanggal berlakunya Protokol, kecuali fakta-fakta tersebut berlanjut setelah tanggal tersebut.⁷ Meskipun demikian, sebagai perbandingan kita tidak akan menemukan pembatasan seperti ini dalam Protokol Opsional untuk ICCPR, sehingga

5 Revised Draft Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, A/HRC/8/WG.4/2 24 December 2001, Explanatory Memorandum para. 12.

6 Beberapa contoh kasus yang dapat menjadi basis dari doktrin ini sebagai berikut: Dalam kasus *Demades v Turkey* “the complaint may be declared admissible, if either the violation or its direct effects continue after the treaty and procedure have entered into force for the State concerned.” Dalam *Muthuthurin Njoka v Kenya* Pengadilan HAM Afrika menyatakan tuntutan tidak dapat diterima karena “[t]he cause of the complaint arose at a time when Kenya was not a party to the charter. There is no evidence of a continuing damage in breach of the charter” (African Commission on Peoples’ and Human Rights Comm No 142/94 para. 5). Selain itu dalam *Blake v Guatemala*, “human rights bodies generally hold that forcible disappearances constitute continuing violations so long as the whereabouts of the person are not clarified.” Lihat Dinah Shelton, *Human Rights, Individual Communications/Complaints*, Max Planck Encyclopedia of International Law, dapat diakses pada www.mpepil.com.
7. Pasal 3 (2) huruf (b), (c) Protokol Opsional untuk ICESCR.

membuat Protokol Opsional ICESCR tampak lebih ketat. Dapat diasumsikan bahwa pendekatan seperti demikian dipilih dalam rangka menghindari besarnya jumlah komunikasi yang disampaikan kepada Komite.⁸

Ketiga ialah unsur dapat diterima *ratione materiae*. Protokol menyebutkan bahwa kompetensi Komite harus mencakup korban yang hak-haknya diatur dalam ICESCR telah dilanggar oleh negara pihak.⁹ Menurut hemat penulis, aturan ini dapat diartikan bahwa semua hak yang diatur dalam ICESCR dapat menjadi materi komunikasi, sehingga hak-hak tersebut memiliki sifat *justiciable* di bawah kewenangan Komite. Namun, kondisi demikian berpotensi menjadi kendala besar bagi negara-negara untuk meratifikasi Protokol ini, terutama apabila berkaitan dengan penegakan hak untuk penentuan nasib sendiri (*right to self-determination*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ICESCR. Oleh sebab itu, dapat diasumsikan bahwa negara-negara dengan kerentanan konflik atas dasar penentuan nasib sendiri yang tinggi, kemungkinan tidak akan memberikan kesempatan bagi gerakan separatis untuk mengajudikasi hak-hak mereka kepada Komite. Terkait problematika ini, pandangan yang lebih jelas telah ditetapkan oleh Komite Hak Asasi Manusia dari ICCPR yang berpendapat bahwa “individuals may invoke minority rights under Article 27 of the ICCPR but not the collective right to under Article 1 of the ICCPR.”¹⁰ Jadi dalam ruang lingkup hak-hak sipil dan politik, telah digariskan pembatasan yang jelas dalam mengadili hak untuk penentuan nasib sendiri. Berdasarkan preseden dari praktik komunikasi tersebut, maka seyogyanya Komite Ekosob dapat mengambil argumentasi yang sejalan dengan Komite HAM untuk ICCPR.

8. Lihat UN Doc. HRI/MC/2008/4.

9. Pasal 2 Protokol Opsional untuk ICESCR.

10. *Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band v. Canada*, Communication No. 167/1984, CCPR/C/38/D/167/1984.

Sebagai unsur keempat, ialah keadaan telah habisnya seluruh langkah pemulihan domestik (*exhaustion of local remedies*). Sebagaimana institusi pemantauan dan penegakan HAM berbasis perjanjian lainnya, mekanisme dalam Protokol Opsional ICESCR ini bersifat pelengkap (*complementary*) dari tugas utama dalam memenuhi kewajiban dalam ICESCR yang berada di bawah yurisdiksi negara-negara pihak ICESCR. Namun demikian, kondisi penyelesaian pelanggaran oleh negara tersebut bukan sesuatu yang absolut, dalam pengertian bahwa pemulihan hak korban sebagai akibat dari pelanggaran HAM dapat dianggap belum habis (*exhausted*) apabila cara atau akses terhadap pemulihan tersebut sia-sia karena sifatnya yang tidak memadai, tidak efektif atau terjadi penguluran waktu dengan tidak wajar.¹¹ Patut disadari bahwa hal ini dapat menimbulkan pertanyaan lanjutan yakni sejauh mana pemulihan yang diambil dalam tingkat domestik tersebut dianggap habis (*exhausted*). Dalam konteks Protokol Opsional ICCPR -dan lebih kurang menurut penulis juga bisa diterapkan dalam konteks operasional Protokol Opsional ICESCR- Manfred Nowak menjelaskan pengertian pemulihan yang tersedia (*available remedy*), yakni:

Taking into account the primary importance of judicial remedies expressed in Article 2(3) (b) of the Covenant, the term 'all available domestic remedies' refers in the first place to judicial remedies. The effectiveness of the remedy also depends on the nature of the alleged violation. In other words, if the alleged offence is particularly serious ... purely administrative and disciplinary

*remedies cannot be considered adequate and effective ... The author is not however required to make use of pure pleas for clemency or pardon, parliamentary petitions, supervisory complaints, applications to an ombudsman or department of corrections, as well other remedies that, in view of the circumstances of the case, appear ineffective or without any reasonable prospect of success.*¹²

Berangkat dari argumentasi tersebut, pengujian struktural (*structural test*) terhadap ketersediaan mekanisme pemulihan domestik pertama-tama diarahkan pada pemulihan secara yudisial, untuk kemudian pertimbangan lanjutan diberikan terhadap tingkat keseriusan pelanggaran HAM yang terjadi.

Apakah Protokol Opsional ICESCR Menyelesaikan Perdebatan?

Berangkat dari kemajuan rezim HAM internasional saat ini, kita bisa melihat bahwa mekanisme komunikasi individual telah memberikan cara yang efektif untuk mempromosikan kepatuhan (*compliance*) negara terhadap kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Akan tetapi, mengingat ketidakjelasan sifat dan perdebatan tentang justisiabilitas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, penulis berpendapat bahwa penerapan mekanisme penegakan norma HAM tidak akan sederhana menerapkan kerangka hukum yang sama untuk semua hak, yakni antara hak sipil dan politik di satu sisi dan ekonomi, sosial dan budaya di sisi lain. Setidaknya terdapat empat argumen umum yang mendukung masalah ini.

12. Manfred Nowak: *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (2nd Revised Edition, Kehl: N.P. Engel Publisher, 2005) 886-887, sebagaimana dikutip dalam: Malcolm Langford, *Closing the Gap? An Introduction to the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol.27, NR 1, S. 1-28, 2009, p.22.

11. ECHR, *Velásquez Rodríguez v Honduras Case*, para. 38 "In accordance with international law, remedies do not have to be exhausted if recourse to them would be futile because they are inadequate, ineffective or unreasonably prolonged."

Pertama adalah sifat justisiabilitas. Secara tradisional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dipandang sebagai hak yang tidak jelas (absurd) sehingga tidak dapat ditegakkan, karena sebagian besar pemenuhan hak tersebut tergantung pada kemampuan negara pihak untuk menyediakan standar minimum hak berdasarkan sumber daya yang tersedia. Terkait hal ini, Seymour Rubin berpendapat bahwa:

*when one discusses civil and political rights, one is generally talking about restraints on governmental action, not prescriptions for such action ... [it] is easier to tell governments that they shall not throw persons in jail without a fair trial than they shall guarantee even a minimal but sufficient standard of living.*¹³

Lebih lanjut, dua alasan mendasar mengenai keterbelakangan justisiabilitas (*underved justiciability*) dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini meliputi: i) kata-kata (*wordings*) di dalam ICESCR, dan ii) mekanisme pemantauan internasional yang relatif lemah dalam kovenan tersebut.¹⁴ Selanjutnya terkait argumentasi tersebut, Philip Alston memandang alasan pertama sebagai alasan primer, yakni:

It is generally agreed that the major shortcoming of the existing international

13. Seymour L. Rubin, *Economic and Social Rights and the New International Economic Order*, Address Before the American Society of International Law dikutip dalam:

Herman Schwartz, *Do Economic and Social Rights belong in a Constitution?* dalam Grossman, Claudio, et al. "A Festschrift in Honor of Seymour J. Rubin." *American University International Law Review* 10, no. 4 (1995): 1215-1274, hlm.1233.

14. Martin Scheinin, *Economic and Social Rights as Legal Rights*, dalam: Asbjorn Eide *et al*, *Economic, Social and Cultural Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, 2001, hlm. 31.

*arrangements for the promotion of respect for economic rights is the vagueness of many of the rights as formulated in the Covenant and the resulting lack in the clarity as to their normative implications.*¹⁵

Namun demikian dari sudut pandang yang berbeda, Craven menyebutkan bahwa "*justifiability depends not upon the generality of the norm concerned, but rather on the authority of the body making the decision.*"¹⁶ Berangkat dari argumentasi Craven tersebut, penulis beranggapan bahwa justru mekanisme komunikasi individual yang kemudian diatur dalam Protokol Opsional ini akan menjadi jawaban dari perdebatan tentang justisiabilitas ini. Mekanisme tersebut akan menjaga keseimbangan (*strike a fair balance*), atau pada taraf tertentu menyajikan kompromi, antara pada satu sisi kebutuhan akan lembaga adjudikasi dan di sisi yang lain apresiasi terhadap konsep kewajaran (*reasonableness*). Oleh sebab itu, Protokol Opsional ini di satu sisi akan mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* terkait pemenuhan hak ekosob, dan di sisi lain juga mengakui kewajaran (*reasonableness*) bagi negara-negara pihak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Argumentasi *kedua* adalah persoalan legitimasi. Penulis akan memulai perdebatan dalam persoalan ini

15. Philip Alston, *No Right to Complain About Being Poor: The Need for An Optional Protocol to the Economic Rights Covenant*, hlm. 86, sebagaimana dikutip dalam Martin Scheinin, *Id.et all, Evolution or Revolution? Extrapolating from the Experience of the Human Rights Committee*, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol.27, NR 1, S. 97-113, 2009.

16. Matthew Craven, *The Domestic Application of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1993) XL *Netherlands International Law Review*, 389, sebagaimana dikutip dalam: Scheinin *et al*, *Evolution or Revolution? Extrapolating from the Experience of the Human Rights Committee*, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol.27, NR 1, S. 97-113, 2009, hlm.100.

dengan pendapat dari Backer, yang menyebutkan bahwa :

*the Covenant establishes the values and directions but leaves it to subsequent implementation to decide how far States should go. The Committee will therefore, unavoidably, not only address matters of enforcement and enforceability, but standard-setting as well. The principle of evolutive or dynamic interpretation which appears to prevail in human rights bodies makes it difficult to predict the legal situation. The very existence of that principle of interpretation implies, in reality, a transfer of legislative powers from the national parliament based on general elections to a small international body of experts or other members.*¹⁷

Pada hakekatnya, pendapat demikian terasa berlebihan, mengingat terdapat konsep kewajaran (*reasonableness*) yang di dalam Protokol disebutkan dalam Pasal 8 (4):

When examining communications under the present Protocol, the Committee shall consider the reasonableness of the steps taken by the State Party in accordance with Part II of the Covenant. In doing so, the Committee shall bear in mind that the State Party may adopt a range of possible policy measures for the implementation of the rights set forth in the Covenant.

Berangkat dari Pasal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa prinsip 'kewajaran' harus dapat menerima batas-batas apresiasi (*margins of appreciation*)

bagi negara untuk terlibat dan bahwa penegakan hukum, keberlakuan, dan juga penetapan standar masih merupakan langkah-langkah kebijakan di bawah wewenang pemerintah. Lebih lanjut, mengingat fakta bahwa pandangan (*views*) dari Komite tidak mengikat secara hukum, maka pemerintah dan legislatif akan masih dengan mudah mengamankan otoritas mereka. Oleh sebab itu bagaimanapun, prinsip 'kewajaran' adalah pedang bermata dua:

*It can be used by adjudicative bodies and courts to justify a virtually unlimited "margin of discretion" to states' socio-economic policy and hence to deny adequate adjudication of or effective remedies for substantive social rights claims. Alternatively, it can be used to rise to the challenge presented by genuine rights claims that go to the systemic causes of poverty and exclusion ... While the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) is directed by Article 8(4) not to shy away from adjudicating these critical [substantive social rights] claims, it is at the same time directed not to lose sight of the fact that its role is to focus on compliance with the ICESCR and on the fundamental values it protects. The CESCR will not, under the reasonableness review that is endorsed in Article 8 (4), impose its own policy choices when other choices may be available and preferred as a means to ensure compliance with the ICESCR. It will not confuse its role with that of the respondent government or other institutions better placed to design and craft appropriate policies and programs.*¹⁸

Argumentasi ketiga adalah persoalan

17. Inge Lorange Backer, *Ideals and Implementation – Ratifying another Complaints Procedure?*, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 27, NR 1, S. 91-96, 2009, hlm. 93.

18. Bruce Porter, *The Reasonableness of Article 8 (4) – Adjudicating Claims from the Margins*, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 27, NR 1, S. 39-53, p.40-41.

kompetensi. Sebelum analisis lebih jauh, penulis ingin menekankan bahwa memberikan konten untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya agar menjadi justisiabel (dapat ditegakkan) tidak berarti secara serta-merta dapat menyamakan penegakannya dengan penyelesaian melalui pengadilan. Responsivitas dan fleksibilitas yang lebih besar akan lebih cocok apabila dibandingkan dengan langkah litigasi untuk mencapai tujuan dari hak ekonomi, sosial dan budaya, dimana langkah-langkah ini mencakup langkah pemulihan administratif dan respon legislatif terhadap laporan-laporan dari komisi-komisi HAM terkait.¹⁹

Di luar dari isu yang telah disebutkan sebelumnya, kompetensi Komite Hak Ekosob sebagai lembaga semi-adjudikator juga akan memainkan peran penting dalam perwujudan tujuan dalam ICESCR. Adapun pertimbangan praktis yang perlu ditekankan salah satunya ialah, tidak terdapat alasan untuk percaya bahwa Komite Hak Ekosob akan pada kenyataannya memiliki akses yang lebih baik, atau pemahaman, data ekonomi, demografi, dan statistik yang relevan dari pemerintah yang bersangkutan. Ditambah lagi, waktu dan kemampuan untuk membuat lebih banyak informasi atau pilihan efektif tentang alokasi sumber daya yang terbatas dalam sebuah sistem ekonomi yang sedang terganggu. Meskipun demikian, penulis beranggapan bahwa hal ini tidak akan menjadi perhatian yang nyata, mengingat Komite Hak Ekosob memiliki wewenang yang cukup luas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, sehingga perhatian sebenarnya justru perlu diarahkan pada kemampuan semua anggota Komite untuk bersama-sama terlibat dalam kerja Komite.²⁰

19. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 9 (1998) UN Doc. E/1999/22, Annex IV, para. 9.

20. Malcolm Langford, *supra*. 12, hlm. 16.

Sejalan dengan pendapat Langford tersebut, oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa Komite Hak Ekosob harus mengikuti pola kerja Komite Hak Asasi Manusia (ICCPR) dan mengadopsi kode etik internal sehingga akan membuat negara-negara lebih sulit untuk menunjuk politisi atau duta besar yang sedang menjabat.²¹

KESIMPULAN

Setelah mengamati mekanisme komunikasi yang disediakan oleh Protokol dan menganalisis apakah pelebagaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat menjawab perdebatan panjang tentang justisiabilitas hak ekosob, tulisan ini mengurai beberapa simpulan. *Pertama*, Protokol Opsional ICESCR ini merupakan hasil kompromis antara sifat hak-hak dengan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban dalam ICESCR. *Kedua*, Komite Hak Ekosob akan mendukung kebutuhan terhadap lembaga adjudikasi dalam rangka memperjelas cara pandang tradisional terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dan *ketiga*, diperlukan sebuah koordinasi yang komprehensif dan kerjasama dengan institusi hak asasi manusia yang lainnya, baik yang bersifat *treaty based* ataupun badan-badan khusus PBB, tidak hanya dalam masalah teknis tetapi juga dalam cara menafsirkan hukum, mengingat semua hak asasi yang diatur dalam kovenan internasional berasal dari sebuah deklarasi tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Backer, Inge Lorange, 2009, *Ideals and Implementation – Ratifying another Complaints Procedure?*, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 27, NR 1, S. 91-96.
- Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band v. Canada, Communication No. 167/1984, CCPR/C/38/D/167/1984.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 21. *Ibid*.

- General Comment No, 9 (1998) UN Doc. E/1999/22, Annex IV.
- ECHR, Velásquez Rodríguez v Honduras Case.
- Eide, Asbjorn et al, 2001, Economic, Social and Cultural Rights, Martinus Nijhoff Publishers.
- Grossman, Claudio, et al. "A Festschrift in Honor of Seymour J. Rubin." American University International Law Review 10, no. 4 (1995): 1215-1274
- Langford, Malcolm, 2009, Closing the Gap? An Introduction to the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol.27, NR 1, S. 1-28.
- Porter, Bruce, The Reasonableness of Article 8 (4) – Adjudicating Claims from the Margins, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 27, NR 1, S. 39-53, hlm.40-41.
- Scheinin, Martin et al, 2009, Evolution or Revolution? Extrapolating from the Experience of the Human Rights Committee, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol.27, NR 1, S. 97-113.